

Pembahasan TWK

1. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertindak laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor TAP MPR No. VI/MPR/2001
2. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: a. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya Negara Indonesia (alinea I, II, dan III Pembukaan). b. Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan)
4. Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini:
 - a. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
 - b. Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar
 - d. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi
 - e. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
5. Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas, sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat birokrat (pegawai negeri).
6. Kabinet yang dipimpin oleh Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-24 Maret 1956) berinti pada Masyumi. Keberhasilan yang diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa kementerian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya. Pemilu pertama ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante
7. Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen disebut dengan kabinet koalisi
8. Kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) yaitu memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya terjadi pada saat Menteri Keuangan dijabat oleh Syafrudin Prawiranegara. Peristiwa ini dikenal dengan nama Gunting Syafrudin.

9. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN antara lain sebagai berikut: a. Pertumbuhan ekonomi b. Inflasi c. Nilai tukar d. Suku bunga SBI e. Harga minyak internasional f. Produksi minyak Indonesia
10. Hukum yang ditetapkan oleh negaranegara suatu dalam perjanjian Negara disebut dengan hukum traktat. Perjanjian ini bisa berkaitan dengan berbagai macam aspek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan peperangan yang nantinya akan disahkan menjadi sebuah hukum oleh DPR. Hukum Traktat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: hukum traktat bilateral (perjanjian antara dua negara) dan hukum traktat multilateral (perjanjian dengan lebih dari dua negara). Perjanjian ini bersifat mengikat antar negara-negara tersebut. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia.
11. DPD hanya dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama
12. DPD dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 22D ayat 4, yaitu: a. pelaksanaan undang-undang otonomi daerah b. hubungan pusat dengan daerah c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya e. perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama
13. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah diatur dalam UU No. 32 Th 2004.
14. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah kedudukan DPRD adalah sejajar terhadap Kepala Daerah.
15. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
16. Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar pembentukan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004: a. Potensi daerah b. Luas wilayah c. Jumlah penduduk d. Kemampuan ekonomi
17. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan.
18. Salah satu asas pemerintahan daerah yaitu asas keterbukaan memiliki arti bahwa penyelenggaraan pemerintah haruslah terbuka, transparan, dan tidak bersifat rahasia.

19. Pelaksanaan otonomi daerah dengan tetap berdasarkan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari asas kepastian hukum.

Prasasti Yupa yang dikeluarkan oleh Mulawarman berbentuk tiang yang digunakan juga untuk mengikat hewan kurban untuk persembahan.

Sebutan Nusantara pertama kali dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit.

Belanda mengakui secara de facto RI atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura merupakan salah satu hasil perundingan Linggarjati.

Tokoh perjanjian linggarjati:

- Inggris : Lord Killearn.
- Indonesia : Sutan Syahrir (Ketua), Muhammad Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, SH.
- Belanda : Prof. Schermerhorn (Ketua), De Boer, Van Pool.

Pengibar bendera kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 adalah Latief Hendraningrat, Suhud Sastro Kusumo, dan Surastri Karma (SK) Trimurti

Gerakan di India yang diprakarsai oleh Mahatma Gandhi, antara lain:

- a. Satyagraha, pencarian kebenaran dengan berpegang teguh pada Tuhan YME.
- b. Swadesi, gerakan cinta tanah air dengan cara mengabdikan kepada lingkungan sekitar dan diri sendiri.
- c. Ahimsa, gerakan anti kekerasan.
- d. Hartal, pemogokan massal sebagai media protes kepada pemerintah

Pembicaraan mengenai penyelesaian hutang-hutang dengan negara-negara kreditor yang berlangsung dari tanggal 19-20 September 1966 di Tokyo dan kemudian dilanjutkan di Paris dan mencapai kesepakatan pada tanggal 24 April 1970.

Lambang Negara Garuda Pancasila pertama kali diresmikan pemakaiannya pada sidang Kabinet RIS yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950.

Budi Oetomo didirikan di Jakarta oleh para mahasiswa STOVIA pada tanggal 20 Mei 1908.

Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut ini: Oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara. Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, dalam tertib hukum Indonesia, merupakan peraturan

hukum positif yang tertinggi. Disamping itu, juga sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

Jenis-jenis penilaian terhadap UUD 1945:

- a. Normatif yaitu penilaian UUD 1945 berlaku secara pengenalan hukum
- b. Nominal yaitu penilaian terhadap UUD 1945 berlaku tidak sempurna
- c. Semantic yaitu penilaian terhadap UUD 1945 berlaku untuk umum

Tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 adalah:

- a. Untuk mengembalikan UUD 1945 berderajat tinggi (supreme constitution), menjiwai konstitusionalisme, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara dan negara hukum.
- c. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik
- d. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
- e. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Berikut ini merupakan perubahan yang penting hasil amandemen pertama UUD 1945:

- a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.

Diubah menjadi : Presiden berhak mengajukan rancangan

- b. Pasal 7 berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Diubah menjadi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

- c. Pasal 14 berbunyi : Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Diubah menjadi : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. ///// GRAB

- d. Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undang-undang menhendaki persetujuan DPR.

Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

Hal ihwal mengenai kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam UUD 1945 BAB III

Lagu Kebangsaan Indonesia “Indonesia Raya” yang diciptakan oleh W.R Supratman termuat dalam UUD 1945 Pasal 36B.

- Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
- Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
- Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
- Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

Apatriide atau keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan yang timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun.

Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda yang diseleenggarakan oleh organisasi-organisasi kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Isi Sumpah Pemuda yang merupakan hasil keputusan Kongres ke-2 pada tanggal 28 Oktober 1928, berisi:

- a. Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia
- b. Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
- c. Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sudah diatur batas-batasnya dalam undang-undang.

Batas Indonesia:

1. Pulau Rondo: pulau paling barat dan paling utara.
2. Pulau Liki dan Pulau Wakde: pulau paling timur.
3. Pulau Miangas dan Pulau Sekatung: pulau paling utara tengah.
4. Pulau Dana dan pulau Pasir: pulau paling selatan

Latar belakang wawasan nusantara jika dilihat dari Pancasila:

- a. Penerapan Hak Asasi Manusia.
- b. Toleransi beragama.
- c. Mengutamakan kepentingan umum.
- d. Pengambilan keputusan dengan musyawarah.

Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara berfungsi sebagai landasan idiil dari wawasan nusantara, karena pada hakikatnya wawasan nusantara adalah perwujudan dari Pancasila

Dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi praktik tumbuh dan kembangnya nasionalisme adalah aspek kekuasaan fisik dan batin.

Fungsi Pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan hierarki tata tertib hukum Indonesia dengan dasar Negara Pancasila sebagai puncak piramidanya yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia terdapat dalam alinea ke IV.

UUD 1945 disahkan sebagai Undang Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945

Beberapa pengaruh positif pasca amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut: a. Mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum b. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang. c. Periode Lembaga Kepresidenan dibatasi hingga 2 periode. d. Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. e. Presiden tidak lagi bertanggung jawab terhadap MPR karena MPR tidak lagi merupakan sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. f. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. g. DPR menjadi lembaga yang lebih supreme, karena kewenangan DPR lebih besar dan hegemoninya lebih dominan.

Pada Pasal 18 ayat 7 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hal ini dilakukan karena negara Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang diatur dalam undang-undang. Hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UUD 1945.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengalami perubahan pada amandemen ketiga, yaitu pada tanggal 1-9 November 2001

Lambang Negara diatur pada Pasal 36 166A yang merupakan hasil amandemen kedua, yaitu pada tanggal 7-18 Agustus 2000

Potongan lagu diatas merupakan lagu berjudul Saputangan Bapuncu Ampat yang berasal dari Kalimantan Selatan, soal ini menguji anda dalam hal Nasionalisme yaitu mempertahankan identitas nasional.

Pada Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 dijelaskan bahwa RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Orang-orang yang mempunyai kesamaan asal keturunan, adat, dan bahasa dan hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki nasib dan tujuan yang sama merupakan pengertian bangsa.

Lagu Ati Raja merupakan lagu khas daerah Sulawesi Selatan.

Berikut ini merupakan asas pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia, yaitu:

- a. Mawas diri
- b. Kesejahteraan dan keamanan
- c. Memperkuat rasa keadilan
- d. Kekeluargaan

Menurut Undang-undang Darurat RI yang termuat dalam Lembaran Negara 1955 Nomor 33 tentang Kependudukan di Indonesia, yang dimaksud orang asing yang menjadi penduduk negara Indonesia yaitu selama orang asing itu menetap di Indonesia

Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung arti bahwa kebudayaan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, kesatuan matra seluruh bangsa yang menjadi modal dari milik bersama bangsa Indonesia.

Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, agama, etnis, dan golongan lainnya agar sesuai dengan prinsip kebhinekaan.

Fungsi mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah a. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata b. Menegakkan keadilan dan menciptakan supremacy of law melalui badan-badan peradilan c. Melaksanakan penertiban (law and order) sehingga terjadi kestabilan dan mencapai tujuan bersama d. Pertahanan untuk menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar dan dalam

Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menternya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia. Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional

Ciri-ciri masyarakat modern yaitu: a. Masyarakat industri b. Nilai prestasi dan universalisme c. Spesialisasi tinggi d. Sistem politik demokratis e. Birokrasi rasional

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3

dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/ atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (UUD 1945 Pasal 7B ayat 7)

Dalam kurun waktu 1945-1949, di Indonesia terjadi perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi sistem Kabinet Parlementer melalui suatu maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 1945.

Bentuk kesatuan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 antara lain: a. Disebutkannya kembali pada pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam alenia ketiga Pembukaan yang menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. b. Ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi. c. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

Sidang MPRS pada masa Orde Baru sebagai koreksi terhadap Orde Lama menghasilkan keputusan-keputusan berikut ini:

- a. Pengukuhan Supersemar
- b. Penegasan kembali landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia
- c. Pembaharuan Kebijakan Landasan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
- d. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
- e. Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno
- f. Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden sampai dengan terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum

Suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsurunsur berikut ini, yaitu:

- a. Nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri.
- b. Dasar pelaksanaan ketatanegaraan, yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari satu kelompok saja.
- c. Isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan, karena harus melalui penjabaran yang mendalam

Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat diuraikan sehingga hasil pembangunannya sesuai dengan Pancasila, antara lain:

- a. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis yang ada.
- b. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, secara mutlak hanya melayani satu ideologi tertentu saja dan mengabaikan manusia.
- c. Pembangunan harus menghormati HAM.
- d. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut mereka.
- e. Pembangunan diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial.

Pembentuk UUD 1945 sendiri masih belum merupakan badan respresentatif untuk menetapkan UUD dan berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan, penetapan Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada UUD 1945 dapat diperkirakan pembentuk UUD 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan UUD dan berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan, penetapan.

Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 sebelum diamandemen, UUD 1945 setelah dimandemen, Konstitusi RIS, dan UUDS.

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan - UUD 1945 sebelum diamandemen UUD di Indonesia yang pernah berlaku dua kali di Indonesia adalah UUD 1945 sebelum diamandemen karena pernah terjadi perubahan bentuk negara dan badan konstituante belum berhasil membuat UUD yang baru sehingga diberlakukan kembali. Adapun pemakaian pertama pada awal kemerdekaan yakni (18 Agustus 1945-27 Desember 1949). Kemudian, setelah UUDS 1950 selesai, diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen mulai pada tanggal 5 Juli 1959

Yang menyatakan kembali ke UUD 1945 adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang disebabkan Badan Konstituante belum bisa membuat UUD yang baru.

Yang mengesahkan UUDS adalah KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah. Jika KNIP tidak ada di pilihan jawaban maka pilihlah kabinet.

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Inkai , dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945.

Anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang kemudian ditambah beberapa orang menjadi 27 orang. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno

Prinsip penulisan negara kesatuan yang tidak dapat dirubah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 1.

Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pilihan - Cita-cita kebangsaan

Dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika mempunyai makna realitas sosial yang merupakan cita-cita kebangsaan.

Menurut Prof. Notonegoro salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas.

Asas Ius soli adalah asas daerah kelahiran, bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.

Orang-orang yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan suatu perjanjian luhur dari seluruh bangsa Indonesia yang harus selalu dihormati dan dijunjung tinggi sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berperilaku.

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (memuat hak dan kewajiban) dari lembaga-lembaga negara.

Syarat permohonan pewarganegaraan orang asing adalah:

- Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.
- Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
- Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
- Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
- Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Anggaran Pendidikan nasional diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yang berbunyi : Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kesehatan 6,2%

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5 mengatur tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Undang-Undang Dasar Sementara atau dikenal dengan UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konstitusi ini hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945.

UUDS hanya bersifat sementara oleh karena itu harus segera dibuat UUD yang baru oleh Badan Konstituante. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Badan Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UUD 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang yakni mengubah dan menetapkan undang-undang. Selain itu, MPR juga bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

Konstitusi Rigid adalah suatu konstitusi dimana perubahannya dilakukan suatu cara tertentu atau proses khusus. UUD 1945 disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ anggota MPR yang hadir dalam sidang

Naskah Proklamasi dirumuskan oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Soebardjo di rumah Laksamana Tadashi Maeda pada 17 Agustus 1945 waktu dini hari.

Gubernur Jenderal pada masa Indonesia dijajah Inggris adalah Thomas Stamford Raffles. Inggris menyerbu pulau Jawa pada saat Gubernur Jenderal Daendels (Belanda) dipanggil kembali ke Eropa. Pengganti Daendels adalah Jenderal Jan Willem Janssens. Janssens tidak mampu menahan serangan dari Inggris sehingga pada tanggal 18 September 1811 Janssens terpaksa menyerah dan harus menandatangani Perjanjian Tuntang.

Gubernur Jenderal yang dijuluki Jenderal Guntur karena terkenal dengan kekejamannya adalah Herman Willem Daendels. Daendels berkuasa tahun 1807-1811 menggantikan Albertus Wiese sebagai Gubernur Jenderal ke-36. Julukan Daendels adalah Jenderal Guntur, Maarschalk een Gouverneur Generaal van Indie

Yang merupakan sebuah sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing disebut etnosentrisme

Bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak disebut Cultural lag.

Isi UUD 1945 untuk :

- Pasal 25: Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.
- Pasal 26 ayat 2: Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- Pasal 28B ayat 1 : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- Pasal 28C ayat 1 ; Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Saat ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral. Demikian juga sebaliknya.

Selain wakil presiden, dan para Menteri, dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh empat pejabat setingkat Menteri, yaitu :

- Jaksa Agung
- Panglima TNI
- Kapolri
- Sekretaris Kabinet

Undang-Undang negara yang mengatur tentang koperasi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967

Wakil Indonesia dalam pendirian ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, adalah Adam Malik.

Kebijakan dalam bidang agama merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak ikut dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah otonom

Adapun Kebijakan pemerintah pusat antara lain: pajak, hubungan luar negeri, Agama dan pertahanan negara

Bank Sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan UU Nomor 13 tahun 1968. Bank Sentral memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang mengatur kegiatan perbankan, mengatur

perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, dan mengajukan pencetakan/penambahan mata uang rupiah.

UUD 1945 walaupun secara resmi tidak menggunakan nama UUD Sementara namun UUD 1945 sejak semula oleh pembentukannya dimaksud bersifat sementara yang hal ini dapat dilihat dalam Aturan Tambahan Pasal 2 yang berbunyi Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar

Pencetus Sumpah Pemuda adalah Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia.

Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1942

Mpu Tantular yang menulis Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah seorang sastrawan yang beragama Budha. Mpu Tantular hidup pada abad ke-14 Majapahit pada pemerintahan Raja Rajasanagara

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan terluas di dunia baik itu pulau besar dan pulau kecilnya yang berjumlah 17.504

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

- Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 Perubahan pertama UUD 1945.
- Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 Perubahan kedua UUD 1945.
- Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 Perubahan ketiga UUD 1945.
- Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 Perubahan keempat UUD 1945.

Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini disebut juga dengan Kebijakan Uang Ketat.

Strategi pembangunan Indonesia diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat sebagai landasan penciptaan pembangunan yang kokoh. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

PT. Jasamarga adalah salah satu Badan usaha Milik Negara yang berbentuk Persero.

PT.KAI berbentuk Perjan.

Perhutani, Percetakan Negara, dan Damri berbentuk Perum.

Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin menawarkan lima asas dasar Negara Republik Indonesia yang meliputi :

- Peri Kebangsaan
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan
- Kesejahteraan yang berkebudayaan

Hal ihwal mengenai kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam UUD 1945 BAB III

Bagian keempat ,Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini: a. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. b. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat. d. Ditetapkannya dasar kerohanian negara (dasar filsafat Negara Pancasila).

Tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 adalah:

- a. Untuk mengembalikan UUD 1945 berderajat tinggi (supreme constitution), menjiwai konstitusionalisme, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara dan negara hukum.
- c. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik
- d. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
- e. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Orang-orang yang mempunyai kesamaan asal keturunan, adat, dan bahasa dan hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki nasib dan tujuan yang sama merupakan pengertian bangsa.

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang terbaru diatur dalam UU No. 23 tahun 2014

Fungsi Pancasila

- Pancasila sebagai Dasar Negara – Mengatur
- Pancasila sebagai Pandangan Hidup – Petunjuk
- Pancasila sebagai Ideologi Bangsa – Landasan Berperilaku

- Pancasila sebagai Jiwa Bangsa – Nyawa
- Pancasila sebagai Sumber Hukum – Perundang-Undangan
- Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa – Ciri Khas
- Pancasila sebagai Cita-cita Bangsa – Cita-cita / Tujuan
- Pancasila sebagai Perjanjian Luhur – Digali / Disepakati
- Pancasila sebagai Falsafah Hidup – Mempersatukan
- Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan – Pembangunan
- Pancasila sebagai Sumber Nilai – Baik / Buruk, Benar / Salah

Pancasila Menurut Moh. Yamin : Pancasila berasal dari kata 'panca' yang berarti lima dan 'sila' yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

Paham integralistik adalah paham yang kepentingan masyarakat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia dihargai. Di Indonesia ciri khas paham ini dapat dilihat dalam kehidupan perdesaan.

Mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif, yaitu:

Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif

Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala2 sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala2 tersebut

Sebagai kepala negara, menurut undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut ini:

1. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
2. Mengangkat duta dan konsul.
3. Menerima duta dari negara lain.
4. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia

Pasal 13 Ayat 3 : Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pengertian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, Abolisi

- Grasi > hak presiden untuk mencabut, mengurangi hukuman yang telah diberikan oleh hakim
- Rehabilitasi > tindakan presiden dalam pengembalian hak seseorang yang sudah dihilangkan
- Amnesti > pernyataan terhadap seseorang atau sekelompok orang untuk meniadakan hukum pidana

- Abolisi > Penghapusan hak tuntutan pidana atau menghentikannya jika telah dijalankan

Hasil perubahan UUD 1945 ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambahkan jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24B dan 24C.

Hakim konstitusi akan diberhentikan dari jabatannya secara hormat jika:

1. Sudah berusia 67 tahun.
2. Meninggal dunia.
3. Telah berakhir masa jabatannya.
4. Mengajukan pengunduran diri pada MK.
5. Sakit.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan desentralisasi

Berdasarkan pasal 2 UU No. 12 Th. 2003, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas LUBER JURDIL (cuma singkatan aslinya kepanjangannya)

Urutan lembaga tinggi negara hasil amandemen > MPR – DPR – Presiden – MA – MK – BPK

Peraturan yang meresmikan provinsi Banten sebagai provinsi mandiri diluar provinsi Jawa Barat adalah UU No. 23 Th. 2000

Jumlah partai peserta pemilu tahun 2009 adalah 48 partai.

Organisasi negara yang berperan dalam pengekspor minyak dinamakan OPEC.

Organisasi kerjasama ekonomi Asia Pasifik : OPEC.

Jumlah negara yang mengikuti KTT : 18 negara.

Fungsi Legislasi : Menetapkan UUD dan GBHN

Ketentuan mengenai lambang negara tertuang dalam PP No. 66 tahun 1951.

Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap:

- Undang-undang hasil pemikiran DPR.
- Keputusan Menteri.
- Keputusan Presiden.
- Peraturan Pemerintah.

Sedangkan peraturan daerah diuji oleh DPRD.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuatan yang merdeka: terlepas dari pengaruh ataupun intimidasi pemerintah.

Unsur kedudukan manusia manusia dalam hukum dan pemerintahan dalam buku Dicey (1835 - 1922), dengan judul “The Rule of Law” artinya antara lain:

- Hak Asasi Manusia.
- Kesejahteraan di depan hukum.
- Supremasi Hukum.
- Hak dan kewajiban manusia dalam hukum.

Teori pemisahan kekuasaan pada trias politika dikemukakan oleh Montesquieu.

Teori perjanjian masyarakat terdapat dalam buku yang dikarang oleh: John Locke.

Ciri2 negara hukum antara lain:

- Pemerintah berdasarkan hukum.
- Pengadilan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggaran hukum.
- Peradilan yang bersih dan tidak memihak.
- Pengakuan terhadap hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM.

Batas Laut Indonesia:

- Laut teritorial yang diukur sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Negara berkuasa terhadap laut maupun udara yang berada pada batas laut teritorial.
- Landas Kontinen batas dasar laut yang boleh dikelola yaitu sedalam 150 meter, dengan batas wilayah sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal
- ZEE adalah batas laut sebuah negara yang luasnya 200 mil dari dasar pantai. Negara berhak atas kekayaan alam didalamnya, menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang diatasnya atau melakukan penanaman kabel dan pipa.

Pada hakikatnya rakyat adalah sebagai: Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara.

Hukum privat adalah hubungan yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan alat-alat perlengkapan negara.

Dampak positif pendudukan Jepang atas Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar mengajar.

Kedaulatan Kedalam yaitu kekuasaan suatu negara untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan negara lain.

Kedaulatan Keluar yaitu kekuasaan suatu negara untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara mana saja.

Perbedaan wilayah teritorial suatu negara dengan wilayah ekstrateritorial adalah secara nyata berada di wilayah negara lain.

Perbedaan mendasar antara bentuk pemerintah kerajaan dan republik terletak pada: Pengangkatan dan masa jabatan kepala negara.

Bentuk negara lebih terfokuskan pada klasifikasi penyatuan masyarakatnya.

Bentuk kenegaraan adalah lebih terfokus pada sistem pemerintahannya.

Perbedaan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan adalah negaranya tidak terbagi kedalam daerah bagian.

Sistem referendum dalam pemerintahan negara hukum adalah: Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintahan besar sekali.

Stesel aktif adalah seseorang harus melakukan tindakan hukum yang aktif untuk menjadi warga negara (memiliki inisiatif sebagai warga negara).

Subjek atau pelaku hukum Internasional adalah Organisasi Internasional.

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki ciri2 sebagai berikut:

- Kedaulatan ke luar tetap di tangan pemerintah pusat.
- Daerah tetap diberi wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri.
- Adanya pelimpahan wewenang (dekonsentrasi).

Fungsi partai politik adalah melaksanakan pendidikan politik bagi warga negara.

Yang termasuk kedalam peradilan khusus adalah peradilan militer.

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai peradilan banding dan kasasi.

Wewenang MK yaitu:

- Menguji Undang-undang terhadap UUD.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- Memutuskan pembubaran partai politik.
- Memutuskan perselisiha tentang hasil pemilu.

Lembaga peradilan dapat dibedakan sebagai berikut:

- Pengadilan Umum.
- Pengadilan Agama.
- Pengadilan Militer.
- Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tugas wakil presiden:

- Memerhatikan secara khusus, menampung masalah2, dan mengusahakan pemecahan masalah2, menyangkut bidang tugas kesejahteraan negara.
- Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen, dalam hal inspektur-inspektur dari departemen-departemen yang bersangkutan.

Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dalam bidang hukum dan peradilan. Lembaga yang berada pada ranah yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah

Agung, dan Lembaga peradilan yang berada dibawah peradilan umum. Tugasnya adalah membahas rancangan undang-undang, melakukan amandemen undang-undang dasar.

Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Pasal 23A UUD 1945 menyiratkan tentang kewajiban membayar pajak.

Pasal 24A UUD 1945: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji UU.

Pasal 24C UUD 1945: Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU.

Pasal 32 UUD 1945: Setiap orang berhak untuk mengembangkan kebudayaannya.

Pasal 4 ayat 1: Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum.

Urusan yang termasuk yustisi yaitu mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga masyarakat, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.

UU tentang kehakiman adalah UU No. 48 tahun 2009.

Perjanjian tordesilas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di tordesilas pada 7Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi duopoli eksekutif antara Spanyol dan Portugal.

KOMNASHAM dibentuk berdasarkan Kepres No. 50 Tahun 1993, yang diperkuat dengan diterbitkannya UU No. 39 tahun 1999.

Kejahatan genosida sebelum tahun 2000 diadili di pengadilan HAM ad hoc. Sedangkan setelah tahun 2000 yang mengadili adalah pengadilan HAM.

Terorisme bukan termasuk tindakan pidana genosida akan tetapi tindakan terorisme. Sehingga untuk mengadilinya bukan pada pengadilan HAM akan tetapi pengadilan negeri.

Kejahatan Kemanusiaan berbeda dengan genosida, dimana kejahatan kemanusiaan merupakan kejahatan terhadap rakyat sipil selama konflik bersenjata. Sedangkan genosida identik dengan pembunuhan massal yang mencakup seluruh anggota kelompok, ras, agama, atau golongan tertentu.